

PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DALAM PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA WATOONE, KABUPATEN FLORES TIMUR

Frans Bapa Tokan^{1*}, Yosef Dionisius Lamawuran², Maximianus Ardon Bidi¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

²Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

*Korespondensi: frans.fisipunwira@gmail.com

ABSTRACT

Law No. 6 of 2014 concerning Villages emphasizes the central government's extensive promotion of strengthening the capacity of human resources in villages through village fund schemes for empowerment. However, village governments for various reasons, tend to focus more on village infrastructure development over human resource empowerment, resulting in stagnant human resources in villages. The limited knowledge and skills of farmer groups have led to restricted access to community empowerment programs. This community service activity (PkM) aims to enhance the critical awareness of farmer groups to gain access to justice for village development programs and acquire agricultural technology skills for dryland farming through sustainable empowerment. The Participatory Rural Appraisal (PRA) approach is employed as a solution to empower farmer groups in addressing the problems they encounter. Through this PkM, which focuses on enhancing critical awareness and empowerment in the field of food security, farmer groups have become more confident in voicing their own aspirations, demanding access to justice to obtain assistance in the skills of using agricultural technology to increase their agricultural production.

Keywords: *Social mapping; participatory rural appraisal; community empowerment; access to justice; food security; community organizations*

ABSTRAK

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa, pemerintah pusat secara masif mempromosikan penguatan kapasitas sumber daya manusia di desa melalui skema dana desa untuk bidang pemberdayaan. Namun pemerintah desa dengan berbagai alasan lebih fokus pada pembangunan infrastruktur desa dan hasilnya SDM di desa tetap berjalan di tempat. Minimnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan kelompok tani telah berdampak pada rendahnya akses terhadap program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan PkM ini bertujuan meningkatkan kesadaran kritis kelompok tani memperoleh akses keadilan terhadap program pembangunan desa dan penguasaan teknologi pertanian pada lahan kering melalui pemberdayaan secara berkelanjutan. Pendekatan "PRA" (Participatory Rural Appraisal) digunakan sebagai solusi untuk memberdayakan kelompok tani untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Melalui PkM yang fokus pada peningkatan kesadaran kritis dan pemberdayaan di bidang ketahanan pangan, kelompok tani mampu dan berani menyuarakan aspirasinya sendiri

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 29/04/2024
Diterima : 09/09/2024
Dipublikasikan : 01/04/2025

menuntut akses keadilan memperoleh bantuan ketrampilan menggunakan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi hasil pertaniannya.

Kata Kunci: Pemetaan sosial; *participatory rural appraisal*; pemberdayaan masyarakat; *access to justice*; ketahanan pangan; organisasi kemasyarakatan

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu global dewasa ini yang sangat menarik untuk dikaji oleh berbagai kalangan baik di level masyarakat, birokrasi maupun di kalangan akademisi. Dikutip dari *Kompas.id* pada tahun 2024, terdapat 61 daerah yang mengalami krisis pangan sebagai akibat dari konversi lahan, penurunan produktivitas tanaman pangan, lambatnya regenerasi petani, dan perubahan iklim.

Kondisi ini menjadi tantangan serius meningkatnya angka kemiskinan di desa, terkhususnya bagi para petani sebagai imbas krisis pangan tersebut. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, perubahan iklim dan gaya hidup, desa-desa menghadapi berbagai masalah yang mempengaruhi produksi hasil pertanian dan akses pangan serta merosotnya kesehatan masyarakat. Dengan demikian, perlu ada upaya nyata dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang lebih progresif dan responsif mengakhiri kelaparan, akses yang aman dan makanan yang cukup dan bergizi untuk setiap orang seperti yang ditargetkan dalam SDG's pada tahun 2030 (Lestari, et al, 2018).

Keterbatasan lahan pertanian yang subur dan musim kemarau panjang telah menghambat peningkatan kapasitas produksi pertanian petani. Sebabnya pemerintah mesti hadir dan melakukan operasi langsung melalui program pemberdayaan yang memihak pada petani dan mengendalikan langsung dengan menyediakan benih atau bibit unggul, pupuk yang cukup dan pasokan pangan secara memadai melalui skema bantuan dana desa (Virginia V. Rumawas, et al, 2021).

Desa Watoone merupakan salah satu desa di Kabupaten Flores Timur yang mayoritas

penduduknya hidup bergantung pada hasil pertanian tanaman jagung sebagai kebutuhan pangan utama. Berdasarkan observasi lapangan, ditemukan terbatasnya akses petani dalam memperoleh sumber daya bagi penguatan kapasitasnya. Para petani dengan pola tanam tradisional sistem tebas bakar, terbatasnya sumber daya air dan lahan yang subur, perubahan iklim dan bencana alam serta kurangnya pengetahuan dan ketrampilan menguasai sistem pertanian dengan teknologi modern, telah menjadi kendala serius bagi mayoritas petani di Desa Watoone dan desa lainnya.

Persoalan ini telah mengakibatkan para petani tidak memperoleh tingkat produksi maksimal dari tanaman jagung atau lebih sering gagal panen. Pada dasarnya dalam mewujudkan kondisi pangan yang mencukupi kebutuhan, dibutuhkan akses yang memadai dan terpenuhinya konsumsi pangan masyarakat (Negash, et al. 2022).

Menghadapi fenomena ini tampaknya pemerintah desa kurang tanggap dan berupaya optimal dalam mengatasi keterbatasan produksi pangan yang selalu menimpa para petani dari satu musim kemusim berikutnya. Meskipun pemerintah desa menyadari dan mengakui bahwa para petani selalu menghadapi hambatan serius dalam memenuhi kebutuhan akan bibit unggul, pupuk yang cukup, keterbatasan lahan subur serta pasokan pangan bagi rumah tangga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemerintah desa sampai saat ini belum dapat mengambil langkah konkrit, padahal ada anggaran dana desa yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah ini. Kegiatan PkM yang dilakukan dengan mitra Kelompok Tani Desa Watoone Kabupaten Flores Timur adalah

sebagai respon atas keluhan warga masyarakat, khususnya para petani yang selama ini berharap bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah desa berupa bantuan bibit unggul, pupuk, pasokan pangan yang cukup dan berbagai jenis bantuan ketrampilan lain melalui akses dana desa di bidang pemberdayaan.

Bertolak dari kondisi obyektif para petani ini, maka upaya meningkatkan pengetahuan dan akses para petani untuk program pembangunan bidang ketahanan pangan menjadi sangat urgen dilakukan melalui program pemberdayaan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah memanfaatkan peran strategis dari institusi pendidikan tinggi melalui skema pengabdian kepada masyarakat.

Program PkM yang secara periodik diselenggarakan oleh perguruan tinggi merupakan suatu langkah solutif untuk meningkatkan kesadaran kritis para petani, agar berani bersuara memperjuangkan hak-haknya memperoleh akses program pembangunan desa bidang pemberdayaan pada forum musyawarah desa, baik di tingkat dusun maupun desa. PkM serupa juga telah dilakukan sebelumnya dan terbukti mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pemanfaatan lahan kosong dan pekarangan rumah dengan mengembangkan hortikultura (Sidiq, et al. 2021).

Besar harapan setelah kegiatan PkM ini para petani menjadi lebih percaya diri memperjuangkan hak-haknya untuk mengakses program pembangunan desa. Selain itu dapat terbentuk cara pandang baru dari para petani mengenai sistem dan teknologi pertanian modern yang dapat mengoptimalkan produksi pertaniannya serta dapat memulihkan kesuburan lahan pertanian secara berkelanjutan.

METODE

Metode PAR (*Participatory Action Research*) digunakan sebagai strategi untuk melibatkan pelaksana PkM/peneliti secara langsung dalam memberdayakan komunitas petani, mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan mengimplementasikan perubahan

yang diinginkan (Afandi, A., 2020). Dengan demikian, metode PAR dapat digunakan sebagai cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi petani untuk menemukan apa yang menjadi persoalan utama sebagai dasar pijak pemerintah desa membuat kebijakan desa yang lebih responsif.

Kegiatan PkM ini bekerja sama dengan mitra Kelompok Tani Holimulvana di Desa Watoone pada tanggal 15-16 Februari 2024, yang dilakukan berdasarkan beberapa tahapan, antara lain: **(1)** merancang materi untuk kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani mengakses program pembangunan bidang ketahanan pangan di Desa Watoone Kabupaten Flores Timur; **(2)** semua kegiatan akan digerakan oleh tim pelaksana PkM yang bertindak sebagai penanggung jawab dan narasumber dari kegiatan pengabdian, yang terdiri dari tiga orang dosen dan dibantu oleh dua orang fasilitator (mahasiswa) yang sedang melaksanakan program MBKM di desa dapat membantu melakukan pendekatan dengan kelompok tani dan pemerintah desa untuk menyepakati tempat dan waktu pelaksanaan; **(3)** melakukan pertemuan dan diskusi informal dengan sejumlah tokoh masyarakat dan pengurus kelompok tani untuk mengidentifikasi dan memetakan masalah yang sedang dihadapi oleh kelompok tani, yang belum mendapatkan perhatian untuk dipecahkan oleh pemerintah desa; **(4)** presentasi kegiatan, diskusi kelompok (FGD) dan praktek lapangan untuk menemukan akar persoalan dan jalan keluar bagi kelompok untuk mendapatkan akses program pemberdayaan bidang ketahanan pangan, berupa pelatihan, bantuan peralatan, pupuk dan pembibitan; **(5)** evaluasi dan monitoring paska pelatihan agar dapat diketahui sejauh mana progres kelompok tani mendapatkan akses program pemberdayaan di desa. Apabila belum mampu memperjuangkan hak-haknya sebagai warga desa dan apa saja kendalanya agar dapat dicarikan jalan keluarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan mengusung tema kegiatan PkM berjudul “Pemberdayaan Kelompok Tani dalam Program Ketahanan Pangan di Desa Watoone, Kabupaten Flores Timur”, maka setidaknya kegiatan PkM ini menjadi suatu terobosan pemikiran untuk membongkar dominasi pemerintah desa dalam membuat program pembangunan dan rencana anggaran desa. Karena selama ini kelompok tani tidak pernah tersentuh program pemberdayaan terutama yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas petani.

Materi yang disampaikan akan dibagi menjadi dua bagian, yakni materi pertama yang diberikan lebih fokus pada pengembangan wawasan berpikir kritis petani tentang hak-haknya sebagai warga negara dan warga desa berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan materi kedua tentang peningkatan kapasitas kelompok tani dalam mengelola pertanian lahan kering melalui pembuatan pupuk organik dari bahan-bahan sisa hasil pertanian dan teknik pemulsahan organik untuk menjaga kelembaban tanah, mencegah pertumbuhan gulma pada tanaman, meregenerasi unsur hara dalam tanah dan cara melakukan seleksi benih sebelum ditanam. Gambaran materi pelatihan bertitik tolak pada alur pelaksanaan kegiatan berikut.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan
(Sumber: Diolah Penulis, 2024)

Langkah pertama yaitu melakukan sosialisasi tentang dasar pemikiran memperjuangkan hak-hak warga desa sesuai

regulasi dan program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta proses memenangkan ide atau gagasan dalam forum desa. Lalu, penyuluhan untuk membuka pemahaman petani tentang konsep pertanian modern pada lahan kering, penggunaan teknologi pertanian dan bahan-bahan alam lokal untuk meningkatkan produksi pertanian.

Langkah ketiga yaitu melakukan diskusi, bertujuan untuk mendalami peta persoalan petani pada khususnya dan warga desa pada umumnya agar dapat ditemukan jalan keluarnya. Selanjutnya praktek lapangan bagi kelompok tani agar dapat memberikan pengalaman baru bagi mereka tentang pentingnya penerapan teknologi pertanian yang berbasis pada sumber daya alam setempat.

Dengan adanya kegiatan PkM ini diharapkan akan ada kemudahan bagi kelompok tani untuk mengakses program pemberdayaan di desa. Sebab itu kegiatan pemberdayaan terhadap kelompok tani dilakukan agar kelompok tani dan pemerintah desa lebih memahami maksud dan tujuan dari kegiatan PkM dan akan membuka akses bagi petani memperoleh hak-haknya sebagai warga desa. Selanjutnya pembentukan tim untuk mempersiapkan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan praktek lapangan tentang penggunaan teknologi dari bahan-bahan lokal bersama semua pengurus dan anggota kelompok tani.

Dalam mengatasi masalah, petani kegiatan pemberdayaan yang dilakukan fokus pada pengembangan kapasitas kelompok petani melalui sosialisasi dan penyuluhan maupun *focus group discusion* (FGD) dengan tujuan meningkatkan kesadaran kritisnya, agar para petani lebih berani dan percaya diri sebagai warga negara dan warga desa dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri dalam forum resmi di desa. (Martha, 2010). Sebagai petani miskin tidak ada pilihan lain selain melakukan perjuangan atau gerakan yang menjadi semangat dasar untuk meruntuhkan tembok penghalang misteri otoritas yang selama ini mencengkram para petani. Karena hanya gerakan yang membuat

para petani dapat mempejuangkan tuntutan nya dan memenangkan apa yang seharusnya menjadi hak nya (Eko Prasety, 2009).

Berdasarkan hasil pemaparan materi dan hasil diskusi dengan para pemangku kepentingan di Desa Watoone khususnya kelompok tani, telah ditemukan bahwa transformasi pengembangan sumber daya manusia di desa tidak berjalan efektif karena mayoritas petani tidak dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses pembangunan di desa. Karena itu Tim PkM merekomendasikan pendekatan "PRA" (*Participatory Rural Appraisal*) sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan kelompok tani dan bersama pemerintah desa dapat menemukan apa yang dikehendaki kelompok tani sebagai sebuah langkah membuat kebijakan desa.

Pendekatan PRA diperkenalkan pertama kali oleh Chambers (1987) dengan tujuan untuk membantu pemerintah memaksimalkan semua potensi yang dimiliki dengan mengikutsertakan masyarakat luas dalam proses pemecahan masalah di desa, menentukan *road map* masalah hingga pengambilan Keputusan (Tamba, 2020). Dalam mengembangkan kapasitas para petani sebagai kelompok mayoritas yang strategis di desa maka sudah saatnya pemerintah desa memperkuat dan mendorong pendekatan pembangunan berbasis masyarakat dan pentingnya menghargai aspirasi dan mengakui kebutuhan masyarakat dalam proses pembangunan desa (Tokan, FB, et al, 2023).



Gambar 2. Sosialisasi Regulasi tentang Dasar Pemikiran Memperjuangkan Hak Petani

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024)

Dalam sesi tanya jawab dan diskusi mendalam tentang hak-hak petani sebagai warga desa dengan bertitik tolak pada diskusi pembukaan UUD 1945, bahwa negara memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial. Selanjutnya pasal 28C ayat 2 setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan mengutip UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 26 ayat (4) dalam melaksanakan tugas pada ayat 1 sub n. Kepala desa wajib memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa. Selain itu prioritas dana desa tiap tahun selalu diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs desa.

Melalui dialog dan diskusi yang intens, peserta baru menyadari bahwa ternyata hak-hak mereka sebagai petani terabaikan dalam arti selama ini para petani kurang mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah desa. Karena itu semua peserta yang hadir setelah mendapatkan informasi yang lengkap tentang dasar pijak pemberdayaan, bertekad memperjuangkan hak-haknya melalui forum resmi desa.

Dengan pengetahuan dan kesadaran kritis yang diperoleh selama kegiatan, maka setelah berakhirnya kegiatan timbul kesadaran baru bahwa kedepannya mesti lebih aktif terlibat dalam pertemuan dan musyawarah baik di tingkat RT, dusun dan desa. Dengan begitu kelompok tani diharapkan dapat menjadi penggerak utama membangun kesadaran kritis warga desa pada umumnya dengan cara selalu terlibat aktif dalam seluruh proses pembangunan di desa, yakni mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini.

Berdasarkan hasil dialog dengan beberapa peserta diskusi diketahui bahwa Desa Watoone mayoritas penduduknya adalah petani pada lahan kering, sebab itu tim PkM merekomendasikan agar dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat pada tahun yang akan datang mesti lebih fokus pada pemberdayaan kapasitas kelompok tani yang ada di desa. Setelah selesai sesi diskusi ini kemudian dilanjutkan pada hari kedua yakni kegiatan penyuluhan dengan sub tema: peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis kelompok tani dengan lokasi kegiatan di lahan pertanian petani.

Melalui PkM ini tim pelaksana pengabdian berkolaborasi dengan fasilitator program dari LSM yang bergerak di bidang pertanian yang ada di kabupaten untuk bersama-sama memberikan pelatihan tentang praktik pertanian modern, dan pengolahan tanah melalui proses pembuatan pupuk organik pada pertanian lahan kering. Dalam kaitan dengan masalah ini, pemerintah mestinya secara berkala memberikan bimbingan teknis untuk menerapkan teknologi organik dan bio/hayati secara periodik guna meningkatkan kesuburan lahan secara berkesinambungan (Reni Chaireni, et al, 2020).



Gambar 3. Kegiatan Penyuluhan tentang Pembuatan Pupuk Organik

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024)

Gambar 3 di atas adalah praktik menyiapkan dan mengolah bahan-bahan alam untuk pembuatan pupuk kompos, seperti daun-daun hijau dan kering dan batang pisang kemudian dipotong kecil-kecil agar mudah terurai didalam wadah yang sudah disiapkan. Langkah selanjutnya melakukan pemadatan terhadap bahan-bahan yang sudah disiapkan dan bisa ditambah dengan sedikit tanah pada bagian bawah wadah secukupnya dalam satu wadah ember besar. Selanjutnya tuangkan lagi tanah bekas tanaman di atasnya sebagai penutup dari seluruh bahan-bahan sampah untuk pupuk kompos ini. Padatkan juga tanah yang paling atas dengan menggunakan sendok nasi agar semua bahan-bahan didalam wadah tersebut dipastikan tidak tumpah. Kemudian menunggu selama satu bulan baru bisa digunakan, tetapi selama menunggu proses ini, bisa dibuka bagian penutupnya untuk mengaduk bolak balik lagi bahan-bahan hasil pupuk kompos agar tercampur lebih merata dan memastikan bahwa semua bahan sudah hancur dan terurai menjadi kompos.



Gambar 4. Teknik Pemulsaan Organik dengan Menggunakan Daun

(Sumber: Dokumen Penulis, 2024)

Gambar 4 di atas merupakan teknik pembuatan pupuk organik paling sederhana dengan cara pemulsaan menggunakan daun-daun hijau dan kering serta limbah tanaman di dalam kebun itu sendiri untuk menutup area tanah di kebun. Teknik tersebut berfungsi agar kelembaban tanah tetap terjaga, mencegah pertumbuhan gulma, meregenerasi unsur hara, dan mencegah erosi tanah pada lahan yang struktur tanahnya miring.

Kegiatan penyuluhan ini berangkat dari pemikiran bahwa masih minimnya pengetahuan dan ketrampilan para petani desa, karena selama ini tidak pernah mendapatkan bimbingan teknis dari para fasilitator yang bergerak di bidang pertanian. Padahal apabila para petani diberdayakan maka potensi tanaman jagung sebagai produk unggulan desa dan tanaman lain seperti padi ladang, ubi kayu dan kacang-kacangan dapat lebih optimal produksinya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut ketua kelompok tani, para petani di Desa Watoone rata-rata berpendidikan rendah setingkat sekolah dasar dan SMP dan karena keterbatasan pengetahuannya, mereka hanya mampu menghasilkan produksi pangan dari tanaman jagung berkisar 300 s/d 500 kg/ha. Produksi pangan ini dinilai sangat

rendah atau boleh dikatakan gagal panen, karena tingkat produksi optimal jagung rata-rata 4.047 kg/ha (Indra Setiawan et al., 2020). Rendahnya tingkat produksi tanaman jagung petani di Desa Watoone telah mengakibatkan sebagian besar tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pangan dan kemudian memilih mencari pekerjaan di daerah lain.

Berdasarkan informasi dari para peserta yang terlibat langsung di lapangan terungkap bahwa sebenarnya beberapa tahun terakhir ini, pemerintah desa tidak tanggap terhadap aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat sehingga tidak banyak aspirasi masyarakat dalam membangun desa tidak terserap ke dalam program pembangunan dan anggaran desa. Hal itu tampak dari minimnya gagasan membuat program-program inovatif yang bertumpu pada sumber daya alam, seperti pembuatan pupuk organik menggunakan limbah hasil pertanian dan limbah pekarangan rumah.

Menurut beberapa peserta penyuluhan, pemerintah desa selain tidak tanggap tetapi juga tidak terbuka dan partisipatif dalam menyusun program pembangunan dan anggaran desa. Akhir kegiatan penyuluhan semua peserta menghendaki agar ada komunikasi yang lebih baik dan intens dengan pemerintah desa sehingga dapat tercipta suatu kolaborasi yang efektif dalam pembangunan desa, yakni mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa.

Dengan demikian, pemerintah desa dan BPD di masa yang akan datang lebih fokus pada penguatan kapasitas petani melalui program pemberdayaan terhadap masyarakat terutama para petani yang menjadi kelompok mayoritas dan tulang punggung pembangunan ekonomi desa. Sebab melalui penguatan kapasitas petani, akan mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan mempraktekan teknologi pertanian yang efektif dan berkelanjutan serta produksi pertanian dapat ditingkatkan. Dengan memahami praktik pertanian yang berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik dan praktik

pengelolaan tanah yang baik, dapat membantu petani mempertahankan keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan.

SIMPULAN

Para peserta melalui kegiatan pemberdayaan telah memperoleh wawasan baru dalam memahami pentingnya mengakses program ketahanan pangan dan mampu menganalisis situasi serta masalah yang mereka hadapi secara lebih mendalam. Mereka belajar mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi pertaniannya, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Peserta dapat menunjukkan peningkatan kapasitasnya dalam berpikir kritis. Peserta pelatihan dapat mengevaluasi berbagai sumber informasi, mengidentifikasi bias, dan membuat keputusan yang lebih tepat.

Pelatihan ini telah mendorong partisipasi aktif petani dalam diskusi dan kegiatan kelompok. Mereka setelah mendapatkan pelatihan lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan berbagi pengalaman, serta lebih berani berkolaborasi dengan sesama petani. Kelompok tani telah diberikan contoh dan latihan untuk menerapkan teknologi pertanian dalam kehidupan sehari-hari dan praktik pertanian modern. Mereka pun diajarkan teknik-teknik untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di lapangan. Pelatihan ini juga menekankan pentingnya membangun jaringan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sesama petani, organisasi pertanian, dan lembaga pemerintah. Hal ini untuk memperkuat posisi tawar dan akses terhadap sumber daya desa.

Dengan demikian secara keseluruhan, pelatihan ini berhasil meningkatkan kesadaran kritis petani, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dan akan terus mengembangkan keterampilan yang telah mereka peroleh dan menerapkannya dalam kegiatan di lahan pertanian mereka sehari-hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih dan hormat disampaikan kepada Pimpinan LPPM Universitas Katolik Widya Mandira yang sudah memberikan kesempatan dan Dana untuk membiayai kegiatan PkM melalui hibah pengabdian Unwira tahun 2024. Ucapan terima juga ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani dan para petani pada umumnya, dan Pemerintah desa di Desa Watoone yang sudah berkenan mengizinkan dan hadir sebagai peserta aktif dalam kegiatan PkM di desanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2020, February 11). Participatory Action Research (PAR) metodologi alternatif riset dan pengabdian kepada masyarakat transformatif. Workshop Pengabdian Berbasis Riset di LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Chaireni, R., Agustanto, D., Wahyu, R. A., & Nainggolan, P. (2020). Ketahanan pangan berkelanjutan. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, 2.
- Chambers, R. (1987). *Mulai dari belakang: Rural development putting the last first*. Jakarta: LP3ES.
- Lestari, D. A. A., Martianto, D., & Tanzihah, I. (2018). Pengembangan indeks ketahanan pangan dan gizi tingkat kabupaten di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, 2(1).
- Martha, I. N. (2010). Retorika dan penggunaannya dalam berbagai bidang. *Prasi*, 6(12).
- Negash, S., Shaleka, D., & Ashenafi, M. (2022). Food safety and nutritional status of food insecure households in North Ethiopia. *Journal of Food Security*, 10(1), 32–43.
- Prasety, E. (2009). *Kaum miskin bersatulah*. Yogyakarta: Resist Book.
- Setiawan, I., & Hartini, S. (2020). Optimalisasi usahatani jagung (*Zea mays* L.) di Kampung Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau. *Jurnal Agri Sains (JAS)*, 4(2).
- Sidiq, R. S., Susanti, R., Widodo, T., & Sugiyanto, S. (2021). Pemberdayaan petani lahan gambut melalui

- pemanfaatan cyber extension di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9(4).
- Suryani, S., & Tamba, W. (2020). Penerapan model Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam mewujudkan program pembangunan desa dan desa membangun. *Jurnal Penelitian Transformasi Pengembangan Pendidikan Non Formal-Informal*, 6(2).
- Rumawas, V. V., Nayoan, H., & Kumayas, N. (2021). Peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Jurnal Governance*, 1(1).
- Tokan, F. B., Medho, Y. F., Lamawuran, Y. D., & Ethelbert, Y. (2023). Pelatihan tentang proses pendirian dan penentuan jenis usaha BUMDes di Desa Watoone-Kecamatan Witihamu Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 8(4).